Text video Pancasila

* Pembukaan

Assalamualaikum perkenalkan nama saya Abdillah Mufki Auzan Mubin prodi Teknik Informatika Reguler B1 dengan NPM 40621100046 nah disini saya akan mempresentasikan makalah saya tentang REVITALISASI PANCASILA DAN PEMBAHASAN SILA KELIMA nah disini saya mohon izin untuk mempresentasikan menghadap dinding

**Point ke 1**

* Pancasila dirumuskan dari kehidupan bangsa Indonesia yang digunakan untuk pedoman bangsa Indonesia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila memiliki fungsi sebagai dasar filsafah negara dijabarkan juga sebagai jiwa bangsa,sebagai kepribadian bangsa, sebagai pandangan hidup bangsa, yang kemudian dijadikan sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Jika kita mengamati kejadian di lingkungan masyarakat sekitar kita, kita dapat mengetahui berapa jauh perubahan norma manusia yang melenceng dari kaidah dan nilai Pancasila.

Maka, agar Pancasila itu benar-benar terasa dalam kehidupan sehari-hari dan sekaligus melestarikan Pancasila, maka rakyat Indonesia harus berusaha melaksanakan pedoman pengamalan Pancasila, dengan mendarah dagingkan nilai–nilai yang luhur yang terkandung dalam Pancasila.

* Pengembangan sikap adil terhadap sesama manusia, kesamaan kedudukan terhadap hukum dan HAM, keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan sikap yangtercermin dari pengamalan nilai Pancasila yakni sila ke -5 yang berbunyi Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

. Fungsi dari nilai yang terkandung dalam Pancasilasila ke-5 ini berfungsi sebagai tujuan negara.

Kita dapat menilai dengan mengamati kejadian di sekitar kita. Masih banyak masyarakat Indonesia yang bersikap tidak sesuai dengan nilai moral Pancasila. Mereka cenderung bersikap individualis, menghalalkan segala cara walaupun dengan kerja keras,melemahkan kekuatan hukum, menggunakan sumberdaya dan sumber kekayaan Indonesia dengan berlebihan, menyelewengkan kekuasaan, dan 2 sebagainya.

Pancasila yang disepakati bersama sebagai kepribadian bangsa saat ini kenyataan dilingkungan masyarakat Indonesia bertentangan dengan ajaran Pancasila.

Masih banyak masyarakat yang belum memahami betul makna yang terkandung dari Sila pertama sampai ke lima. Banyak masyarakat hanya memahami bacaan dari sila-sila Pancasila namun belum memahami butir butirnya sehingga banyak penyelewengan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang masih banyak penyelewengan adalah timpang tindihnya keadilan di bangsa ini, antara Pemerintah dengan rakyatnya.Dan kehidupan bangsa ini yang kaya akan semakin berkuasa dan yang miskin akan semakin sengsara.

**Poin ke 2**

* **Pengertian Revitalisasi**

Revitalisasi menurut KBBI adalah kegiatan menghidupkan atau menggiatkan kembali sesuatu yang telah ada sebelumnya. Sedangkan revitalisasi Pancasila artinya menghidupkan kembali Pancasila yang telah ada sebelumnya pada kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Revitalisasi adalah upaya untuk meningkatkan nilai lahan/ kawasan melalui pembangunan kembali dalam suatu kawasan yang dapat meningkatkan fungsi kawasan sebelumnya. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.

Revitalisasi adalah upaya untuk memvitalkan kembali suatu Kawasan atau bagian kota yang dulunya pernah vital/hidup, akan tetapi kemudian mengalami kemunduran/degradasi. Skala revitalisasi ada tingkatan makro dan mikro. Proses revitalisasi sebuah kawasan mencakup perbaikan aspek fisik, aspek ekonomi dan aspek sosial. Pendekatan revitalisasi harus mampu mengenali dan memanfaatkan potensi lingkungan (sejarah, makna, keunikan lokasi dan citra tempat).

* **Revitalisasi Pancasila Sebagai Dasar Negara**

Nilai-nilai luhur yang telah dipupuk sejak pergerakan nasional kini telah tersapu oleh kekuasaan Orde Lama dan OrdeBaru. Orde Lama mengembangkan Pancasila sebagai dasar negara tidak sebagai sesuatu substantif, melainkan diinstumentalisasi-kan sebagai alat politik semata. Demikian pula di Orde Baru yang “berideologikan ekonomi”, Pancasila dijadikan asas tunggal yang dimanipulasikan untuk KKN dan kroni-isme dengan mengatasnamakan sebagai Mandatoris MPR.

Revitalisasi Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa Pancasila harus diletakkan utuh dengan pembukaan, di-eksplorasi-kan dimensi-dimensi yang melekat padanya, yaitu:

1. Realitasnya: dalam arti bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dikonkretisasikan sebagai kondisi cerminan kondisi obyektif yang tumbuh dan berkembang dlam masyarakat,
2. Idealitasnya: dalam arti bahwa idealisme yang terkandung di dalamnya bukanlah sekedar utopi tanpa makna,melainkan diobjekti+asikan sebagai “kata kerja” untuk membangkitkan gairah dan optimisme para warga masyarakat guna melihat hari depan secara prospektif, menuju hari esok lebih baik
3. Fleksibilitasnya: dalam arti bahwa Pancasila bukanlah barang jadi yang sudah selesai dan mandeg dalam kebekuan oqmatis dan normatif, melainkan terbuka bagi tafsir-tafsir baru untuk memenuhi kebutuhan zaman yang berkembang. Dengan demikian tanpa kehilangan nilai hakikinya, Pancasila menjadi tetap aktual, relevan serta fungsional sebagai tiang-tiang penyangga bagi kehidupan bangsa dan negara dengan jiwa dan semangat “Bhineka Tunggal Ika”

Revitalisasi Pancasila, Pancasila sebagai dasar negara harus diarahkan pada pembinaan moral, sehingga moralitas Pancasila dapat dijadikan sebagai dasar dan arah dalam upaya mengatasi krisis dan disintegrasi.

* Contoh-Contoh Pengalaman Revitalisasi Pancasila

1. Revitalisasi Nilai-Nilai Empat Pilar Wawasan Kebangsaan Semua dampak euphoria reformasi yang kita hadapi saat ini, perlu disikapi oleh segenap komponen bangsa melalui pemahaman yang benar, utuh dan menyeluruh dalam konteks semangat persatuan dan kesatuan bangsa.

Semangat tersebut merupakan kata kunci dari aktualisasi dan implementasi nilai-nilai luhur Pancasila yang harus ditumbuhkan kembangkan oleh generasi penerus.

1. Bidang Politik Sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya sebagai pimpinan maupun anggota partai politik, para politisi sangat berperan dalam perumusan peraturan perundangan maupun kebijakan publik. Pemahaman yang komprehensif terhadap nilai-nilai empat pilar wawasan kebangsaan sangat dibutuhkan agar para politisi dapat memberikan sumbangsih pemikiran kontruktif dalam peraturan perundangan maupun kebijkan publik yang mengedepankan kepentingan bangsa mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa.
2. Bidang Media Masa Di zaman demokrasi, media masa dapat dipandang sebagai salah satu pilar yang mengawal terselenggaranya kehidupan demokrasi yang sehat, beretika 6 dan bermartabat. Disamping itu, ditengah pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, peran media massa menjadi sangat penting dan strategis dalam bentuk watak dan karakter bangsa.
3. Bidang Ekonomi Pengusaha merupakan salah satu motor penggerak perekonomian bangsa. Dalam menjalankan perannya, para pengusaha senantiasa dihadapkan pada pilihan dilematis antara kepentingan usaha dan kepentingan bangsa. Di era globalisasi dan perdagangan bebas, para pengusaha dituntut untuk memiliki kemampuan memilih dan memilah agar perekonomian bagsa dapat memajukan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara signifikan. Dengan pemahaman terhadap nilai-nilai empat pilar wawasan kebangsaan, diharapkan para pengusaha mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan rakyat.

* **Makna Dan Arti Sila Ke-5**

Bunyi sila ke-5 yaitu “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” memiliki Lambang Padi dan Kapas. Merupakan perwujudan yang paling konkret dari prinsip-prinsip Pancasila. Dalam sila kelima prinsip yang melekat adalah prinsip keadilan. Berarti keadilan sosial adalah perwujudan sekaligus cerminan dari sila sila sebelumnya yang ada di dalam Pancasila.

* **Nilai Yang Terkandung Pada Sila Ke Lima**

Nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila adalah nilai keadilan. Sikap positif terhadap nilai-nilai Pancasila yang sesuai dengan sila kelima yaitu 7 menjunjung tinggi keadilan sosial, semangat gotong royong, dan saling menghargai serta menghormati hak dan kewajiban serta upaya keja keras satu sama lain.

Oleh karena itu manusia dikatakan pula sebagai makhluk Monopruralisme. Konsekuensinya nilainilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama meliputi :

1. Keadilan Distributif Aristoteles berpendapat bahwa keadilan dapat terlaksana bilamana hal-hal yang tidak sama diperlukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama diperlakukan tidak sama.
2. Keadilan Legal (Keadilan Bertaat) Keadilan legal adalah keadilan yang berlaku kepada seluruh warga negara terhadap negaranya tanpa memandang status sosial, ras, suku bangsa, bahasa, jenis kelamin, kedudukan politik, dan lain sebagainya.
3. Keadilan Komulatif Penentuan hak di antara berbagai pihak, baik secara fisik atau non fisik. Prinsip keadilan ini menyangkut pada hak milik seseorang, baik yang dari sebelumnya telah dimiliki ataupun yang didapat melalui cara sah. Defisini lainnya, keadilan secara komutatif adalah perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang dilakukan

* **Poin ke 3**

**Penerapan Sila Ke-5 di Indonesia**

1. **Menjunjung tinggi semangat kekeluargaan** dan gotong-royong, semangat kekeluargaan dan gotong royong di kehidupan Semangat kekeluargaan dan gotong royong telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Indonesia. Sikap ini telah lama berkembang sejak kehidupan nenek moyang bangsa Indonesia. Sekarang, semangat kekeluargaan dan gotong royong telah dipraktikkan dalam berbagai bidang kehidupan sehari-hari. Gotong royong berarti bekerja bersama-sama, tolong menolong dan bantu-membantu secara ikhlas baik untuk kepentingan bersama maupun untuk keperluan orang-perorang. Segala tugas akan lebih ringan bila dikerjakan secara bersama-sama yang dijiwai rasa saling memerlukan dan saling membantu.
2. **Pelatihan Kewirausahaan Untuk Pelaku UMKM Bandung**

pemerintah kota bandung mengadakan program pelatihan kewirausahaan untuk pelaku umkm. Sebanyak 30 orang lebih pelaku UMKM kuliner di Kota Bandung mendapat pelatihan tentang kewirausahaan dari brand ritel ternama. Mereka dilatih bidang manajemen, mutu produk dan kemasan. Wali Kota Bandung Oded M Danial menyambut baik program tersebut, karena membantu pemerintah dalam meningkatkan taraf ekonomi UMKM sesuai dengan program pemerintah Kota Bandung. "Bagus sekali saya kira ya, karena sesuai dengan program pemerintah kota bandung dalam meningkatkan taraf ekonomi para pelaku UMKM ini" ujar Mang Oded, sapaan akrab Wali Kota, dalam pembukaan pelatihan kewirausahaan di Padepokan Seni Mayang Sunda Jl. Peta Lingkar Selatan Kota Bandung, Selasa (11/02/2020)

**Contoh Kasus Sila ke-5**

* Konflik Atas Pembangunan Antara Rakyat Vs Pemerintah dan Pemodal Pembangunan dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Ini negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sering mendengar konflik atas pembangunan antara rakyat vs pemerintah dan pemodal. Tidak lain yang menjadi konflik adalah keberadaan tanah sebagai objek hukum agraria.

Pada dasarnya segala bentuk pengelolaan agraria didasarkan pada Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 sebagai ketentuan dasar yang menyatakan:“Bumi, air dan kekayaan alam didalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesarbesarnya untuk kemakmuran rakyat”. Pasal tersbut adalah dasar pengelolaan agraria. Sudah jelas bahwasannya agraria yang merupakan bagian dari pasal tersebut mutlak diperuntukan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Kesejahteraan rakyat yang merupakan cerminan keadilan sosial sebagaimana nilai luhur keadilan sosial dalam pancasila harus dijalankan oleh Negara

* Pembangunan yang tidak merata

Pembangunan Nasional merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang di amanatkan dalam Undang-Undang dasar 1945, yaitu “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia memajukan kesejahtraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial Negara”1 .

Akibat dari kurangnya pemerataan pembangunan memang tidak begitu dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di daerah yang mengalami pembangunan cukup pesat. Disebabkan karena segala kebutuhan hidup mereka relatif lebih mudah untuk didapatkan, seperti pelayanan kesehatan ataupun sarana pendidikan yang tersebar di mana-mana. Hal diatas jauh berbeda apabila dibandingkan dengan daerah yang pembangunannya bisa dikatakan masih lamban, atau masih belum tersentuh oleh pemerintah. Keadaan seperti ini terlihat pada daerah-daerah di Indonesia yang masih terpencil. Mereka harus bersusah payah untuk mendapatkan fasilitas seperti layanan kesehatan, pendidikan atau fasilitas-fasilitas lainnya mengingat jumlahnya yang sangat minim dan tempatnya yang jauh dari pemukiman penduduk terpencil.

* **Poin ke 4**

**Upaya Pemecahan Masalah**

Diperlukan upaya yang tidak mudah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera, paling tidak untuk menciptakan hal tersebut perlu ada kesadaran dari masing-masing individu untuk merubahnya, jika perubahan itu bisa terlaksana dengan baik tentunya keadilan itu akan dapat dengan mudah tercipta, baik dalam bidang hukum, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lain-lainnya. Untuk menciptakan keadilan yang merata seperti yang tercermin dalamPancasila tepatnya sila ke-5, peran dari pemerintah untuk mengupayakan hal 12 tersebut sangat diperlukan. Agar implementasi dari sila tersebut dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan bukan malah merugikan masyarakat. Sebagai contoh dalam bidang pembangunan, pemerintah memberikan uang ganti rugi dan pemindahan warga yang di gusur ketempat yang lebih layak.

* **Poin ke 5**

**Kesimpulan**

Berdasarkan kajian yang telah dibuat dapat diambil kesimpulan bahwa sesunguhnya keadilan adalah hak semua masyarakat. Tetapi di balik hak itu masyarakat harus mengetahui kewajiban bermasyarakat untuk negaranya sendiri khusunya di Negara Republik Indonesia. Keadilan tidak dapat terlaksana jika masyarakat, pemimpin negeri, dan pemerintah tidak saling bersosialisasi dan bermusyawarah dengan bijak serta saling menghargai pendapat yang tercipta di antara masyarakat, pemimpin negeri serta pemerintah negeri. Untuk itu Pemimpin dan pemerintah negeri ini harus memberikan apa yang jadi hak masyarakatnya, memikirkan masyarakatnya agar tercipta kesejahteraan dan berlaku adil untuk seluruh rakyatnya di Indonesia tanpa menyampingkan budaya yang sudah terlahir lebih lama dari pemerintahan Negara Republik Indonesia. Dengan mempertahankan ideologi Pancasila sebagai dasar negara, jika melaksanakannya dengan baik, maka perwujudan untuk menuju negara yang aman dan sejahtera pasti akan terwujud.